

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sementara akuntansi pemerintah meluas pada semua entitas yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Akuntansi pemerintahan yang berkembang menjadi akuntansi sektor publik dapat disebut dengan akuntansi keuangan publik dan akuntansi dana masyarakat. Dimana akuntansi dana masyarakat ini diartikan sebagai teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat.<sup>12</sup>

Akuntansi diartikan suatu bentuk akuntabilitas publik, transparansi, dan prediktabilitas kinerja organisasi. Hal ini merupakan penekanan besar yang ditujukan pada organisasi publik yang menghendaki keterbukaan, transparansi, perlakuan adil, ketidakpihakan (pada golongan), dan prediktibilitas. Dalam konteks organisasi pemerintah bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta

---

<sup>12</sup> Mursyidi. "Akuntansi Pemerintahan di Indonesia". Bandung, 2013. hal. 1-2

pertanggungjawaban tersebut. Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Oleh karena itu, akuntansi pada organisasi sektor publik merupakan sarana yang dapat berperan dan membantu organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik.<sup>13</sup>

## 2. Akuntansi Syariah

Teori akuntansi islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep akuntansi yang berasal dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist, yang digunakan untuk menjelaskan dan mengembangkan praktik akuntansi. Menurut Raharjo Kharis, dalam konsep akuntansi syariah, akuntansi memiliki dua arah kekuatan yang dapat dibentuk oleh lingkungan dan juga dapat mempengaruhi lingkungan. Akuntansi dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga akuntansi syariah akan mempengaruhi para pelaku ekonomi termasuk pelaku transaksi kepada perilaku yang lebih etis, karena akuntansi syariah didasarkan pada prinsip islam yang menerapkan sikap etis termasuk dalam perilaku ekonomi. Informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran, tindakan, bahkan sampai pada pengambilan keputusan dalam bisnis.<sup>14</sup> Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181-182 yang berbunyi :

---

<sup>13</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sector Publik*. Yogyakarta : ANDI, 2009. hal.20

<sup>14</sup> Hani Werdi Apriyanti. *Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik*. Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol. 6 No. 2 Juli 2017. hal. 131 - 140

الْمُحْسِرِينَ مَنْ تَكُونُوا وَلَا الْكَيْلَ وَفُوا

*Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.*

الْمُسْتَقِيمِ بِالْقِسْطِ وَزُنُوا

*Artinya: dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.*<sup>15</sup>

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Dr. Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan dengan benar, maka perlu adanya fungsi auditing. Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut “tabayyun” sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نَادِمِينَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*<sup>16</sup>

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Asy-Syu'ara ayat 181-184 ayat 35 dan Terjemahannya*, (Semarang : CV.Karya Toba Putra).

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surah Al-Hujuraat ayat 6 dan Terjemahannya*, (Semarang : CV.Karya Toba Putra).

dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>17</sup>

Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam, sesuai dengan surat Al Baqarah 282 dijelaskan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan.<sup>18</sup> Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surah Al-Israa' ayat 35 dan Terjemahannya*, (Semarang : CV.Karya Toba Putra).

<sup>18</sup> Hani Werdi Apriyanti. "Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik". *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6 No. 2 Juli 2017. hal. 131 - 140

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>19</sup>*

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa dalam surat Al Baqarah 282 Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi selama melakukan kegiatan muamalah. Penerapan konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam praktik bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak yang terkait. Perintah ini bersifat universal yang artinya dalam praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an surat Al Baqarah 282 dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Karya Toba Putra). hal. 48.

<sup>20</sup> Iwan Triyuwono. "Akuntansi Syariah". Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012. hal. 318

Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah Akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

### **3. Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik.<sup>21</sup>

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum dilihat dari realisasi anggarannya. Apabila realisasinya melampaui anggaran maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja anggaran pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : YKPN. 2016, hal.89

<sup>22</sup> Ibid. hal. 232

Sedangkan kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal ini terlihat adanya efisiensi. Namun perlu diteliti lebih lanjut apakah realisasi belanja yang lebih rendah dari anggaran tersebut karena adanya efisiensi atau ada beberapa program yang yang tidak dijalankan.<sup>23</sup>

#### 4. Analisis Laporan Keuangan

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah antara lain :

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

Analisis varians anggaran pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } x}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } x} \times 100\%$$

Apabila terdapat selisih lebih (jumlah realisasi melebihi jumlah yang dianggarkan) maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik. Sebaliknya

---

<sup>23</sup> Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal. 234

apabila terdapat selisih kurang (jumlah realisasi kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja pemerintah daerah dinilai kurang baik.<sup>24</sup>

#### b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode bersangkutan, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Pertumbuhan pendapatan pada tahun (x) tertentu dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Pend.} = \frac{\text{Pendapatan Th } x - \text{Pendapatan Th } (x - 1)}{\text{Pendapatan Th } (x - 1)} \times 100\%$$

Tentunya diharapkan Pertumbuhan Pendapatan positif dan kecenderungan meningkat, sebaliknya jika terjadi pertumbuhan pendapatan negatif maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan.<sup>25</sup>

#### c. Analisis Rasio Keuangan

##### 1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut<sup>26</sup> :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

---

<sup>24</sup> Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, Hal. 136

<sup>25</sup> Ibid hal. 137

<sup>26</sup> Ibid. hal.140

### Penilaian Tingkat Desentralisasi

Persentase PAD terhadap TPD		Tingkat Desentralisasi
0% - 10%	=	Sangat Kurang
10,1% – 20%	=	Kurang
20,1% - 30%	=	Sedang
30,1% - 40%	=	Cukup
40,1% - 50%	=	Baik
>50%	=	Sangat baik <sup>27</sup>

### 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah. Persentase Ketergantungan Keuanagn Daerah

0% - 10%	=	Sangat Rendah
10,1% – 20%	=	Rendah

---

<sup>27</sup> R. Agoes Kamaroellah. “Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”. E.Journal: Nuansa, Vol. 14. 1 Januari – Juni 2017. Hal. 134

20,1% - 30%	=	Sedang
30,1% - 40%	=	Cukup
40,1% - 50%	=	Tinggi
>50%	=	Sangat Tinggi <sup>28</sup>

### 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut<sup>29</sup> :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

#### Tingkat Kemampuan Daerah dan Pola Hubungan

Kemandirian (%)		Kemampuan Keuangan
0 – 25	=	Rendah Sekali
25 – 50	=	Rendah
50 – 75	=	Sedang
75 – 100	=	Tinggi <sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> R. Agoes Kamaroellah. "Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah". E.Journal: Nuansa, Vol. 14. 1 Januari – Juni 2017. Hal. 135

<sup>29</sup> Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal.140

<sup>30</sup> R. Agoes Kamaroellah. *Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah....* Hal. 132

#### 4. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut<sup>31</sup> :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai Efektivitas PAD

Sangat Efektif	=	>100%
Efektif	=	100%
Cukup Efektif	=	90% - 99%
Kurang Efektif	=	75% - 89%
Tidak Efektif	=	<75%

#### 2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.<sup>32</sup> Analisis belanja antara lain :

##### a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi anggaran belanja dengan anggaran. Dapat dirumuskan sebagai berikut

---

<sup>31</sup> Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*,hal.141

<sup>32</sup> Ibid. hal. 154

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Th x}}{\text{Anggaran Belanja Th x}} \times 100\%$$

#### b. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Analisis keserasian belanja antara lain :

##### 1) Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Merupakan perbandingan antar total belanja operasi dengan total belanja.<sup>33</sup> Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

##### 2) Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah Dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.<sup>34</sup> Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

---

<sup>33</sup> Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...*, hal. 162

<sup>34</sup> Ibid. hal.164

### Penilaian Efisiensi Belanja

<100 %	=	Efisien
=100 %	=	Cukup Efisien
> 100 %	=	Tidak Efisien <sup>35</sup>

## 5. Pendapatan Daerah

PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi empat, diantaranya yaitu :

- a. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
- b. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah ada tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.<sup>36</sup>

Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dan ditata secara tertib, efektif serta efisien, taat pada per-UU yang berlaku, transparan, ekonomis dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Mohammad mahsun. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF. 2009. Hal. 187

<sup>36</sup> Abdul Halim. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat. 2013, hal 56

<sup>37</sup> Mandala Harefa dan Hendra Sony Permana dkk, *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 59

## 6. Belanja Daerah

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja daerah adalah pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah bagi pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan. Bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.<sup>38</sup>

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

- a. Klasifikasi ekonomi, adalah pengelompokan belanja yang berdasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi belanja menurut ekonomi adalah sebagai berikut:
  - 1) Belanja operasi, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi : belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
  - 2) Belanja modal, adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi : belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tidak berwujud.

---

<sup>38</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Belanja daerah*

- 3) Belanja lain-lain/tak terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, meliputi : penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- 4) Transfer, adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- 5) Klasifikasi menurut organisasi, adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kota/kabupaten, dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten, dan lembaga teknis daerah provinsi/kota/kabupaten.
- 6) Klasifikasi menurut fungsi, adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut fungsi, meliputi : belanja pelayanan umum, belanja pertahanan, belanja ketertiban dan keamanan, belanja ekonomi, belanja perlindungan lingkungan hidup, belanja perumahan dan pemukiman, belanja kesehatan, belanja pariwisata dan budaya, belanja agama, pendidikan dan perlindungan sosial.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Belanja daerah*

## 7. Laporan Keuangan Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut.

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Hafis Tanjung. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual*. Penerbit: Alfabeta, Bandung: 2012. hal. 12

## 8. Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya : sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal : informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009). Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi histories. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.<sup>41</sup>

Dalam pelaporan keuangan selain menyajikan informasi-informasi yang sebenarnya juga harus menyajikan laporan keuan dan menyampaikan kepada para pengguna dengan jujur seperti yang tertulis dalam surat Q.S An-Nisa (4) Ayat 58 yang isi kandungannya berkaitan dengan masalah pemerintahan. Orang yang diberi amanah kekuasaan haruslah melaksanakan tugasnya dengan sikap adil yang dapat diwujudkan dengan tanggung jawab dan jujur.

---

<sup>41</sup> M Sadeli Lili. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta : Bumi Aksar. 2002.

## 9. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari :

### a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.<sup>42</sup>

### b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

### c. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

### d. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit

---

<sup>42</sup> *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.*

operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan tahun sebelumnya.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, pengguna, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.<sup>43</sup>

## 10. Peranan Laporan Keuangan

Akuntan publik yang profesional adalah mereka yang kompeten dalam melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan domestik dan multinasional dengan sistem manual atau berbasis teknologi informasi.<sup>44</sup> Setiap entitas pelaporan dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>43</sup> *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.*

<sup>44</sup> Dyah Pravitasari. *Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam Di Indonesia*. E-journal. AN-NISBAH, Vol. 01, No. 02, April 2015

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan tersrtuktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat<sup>45</sup>

c. Transparansi

Memeberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan rrrrpenerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut

---

<sup>45</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI, 2009. hal.163

menanggung beban pengeluaran tersebut mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.<sup>46</sup>

## 11. Tujuan laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu daftar financial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode.<sup>47</sup>

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah.

### a. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

### b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah diterapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan

---

<sup>46</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI, 2009. Hal. 163

<sup>47</sup> Lantip Susilowati. *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*. (Yogyakarta: Kalimasada, 2015). Hal. 35

mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.<sup>48</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Untuk mengetahui dan memperjelas dari penelitian ini terdapat beberapa referensi penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian Lontaan dan Pangerapan<sup>49</sup>, yang bertujuan untuk menganalisis tentang Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten Minahasa tahun anggaran 2012-2014. Hasil dari penelitian perhitungan rasio efisiensi belanja, dapat dilihat mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Minahasa terjadi efisiensi penggunaan anggaran dan Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalami pertumbuhan belanja dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Perbedaan penelitian ini adalah menganalisis mengenai pertumbuhan Belanja saja sedangkan penelitian saya adalah menganalisis tentang kinerja keuangan yang di dalamnya membahas Belanja dan pendapatan daerah dan juga kinerja keuangan ditinjau dari perspektif islam, instansi pemerintah yang di teliti berbeda. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis Realisasi Anggaran Belanja sebagai bahan untuk penelitian.

Penelitian Tantri dan Irmawai<sup>50</sup>, yang bertujuan untuk meneliti mengenai kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart akuntansi Pemerintahan.

<sup>49</sup> Indra Christian Lontaan dan Sonny Pangerapan. "Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014". Jurnal EMBA. Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 898-906

<sup>50</sup> Sakina Nusarifa Tantri Dan Putri Irmawati. "Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016". Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. Vol.1. No.1. Hal. 27-37. Maret 2018.

tahun 2012–2016. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja di Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan kinerja anggaran belanja Dinas Kebudayaan Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 baik. Perbedaan penelitian ini adalah meneliti mengenai Kinerja Anggaran Belanja sedangkan penelitian saya adalah menganalisis tentang kinerja keuangan yang di dalamnya membahas Belanja, pendapatan daerah, kinerja keuangan ditinjau dari perspektif islam dan juga instansi pemerintah yang di teliti berbeda. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis Realisasi Anggaran Belanja sebagai bahan untuk penelitian.

Penelitian Kainde<sup>51</sup>, yang bertujuan untuk mengetahui besarnya analisis varians dan pertumbuhan anggaran belanja daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Pemerintah Kota Bitung. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pertumbuhan belanja daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan belanja setiap tahunnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah tempat, instansi pemerintahan dan periode yang diteliti, penelitian ini hanya mengenai analisis Belanja Daerah sedangkan penelitian yang saya analisis mengenai kinerja keuangan yang meliputi Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan Realisasi Anggaran Belanja sebagai bahan untuk di analisis.

---

<sup>51</sup> Christian Kainde. “*Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung*”. Jurnal EMBA.Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 393-400

Penelitian Erwati dan Fajri,<sup>52</sup> Yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan yang telah dilakukan pemda Kabupaten Bungo dalam merealisasikan PAD sesuai potensi riil yang dimiliki Kabupaten Bungo dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, dan analisis trend. Untuk rasio kemandirian menggambarkan kecenderungan ke arah perkembangan naik, sehingga ini merupakan implementasi yang cukup baik. Analisis trend untuk rasio efektivitas pendapatan asli daerah menggambarkan kecenderungan ke arah perkembangan penurunan yang menandakan kinerja yang kurang baik. Sedangkan analisis trend untuk rasio efisiensi pendapatan asli daerah menggambarkan kecenderungan ke arah penurunan yang menandakan kinerja yang kurang baik. Perbedaan penelitian ini adalah meneliti mengenai Kinerja Anggaran Pendapatan Daerah sedangkan penelitian saya adalah menganalisis tentang kinerja keuangan yang di dalamnya membahas Belanja, pendapatan daerah, kinerja keuangan ditinjau dari perspektif Islam dan juga instansi pemerintah yang diteliti berbeda. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menganalisis Realisasi Anggaran Belanja sebagai bahan untuk penelitian.

Penelitian Pravitasari<sup>53</sup> Yang bertujuan untuk pemahaman kode etik profesi akuntan Islam di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Kebenaran dan keadilan dalam menakar yang menyangkut dalam hal pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga mengharuskan seorang Akuntan untuk menakar kekayaan secara

---

<sup>52</sup> Misni Erwati dan Muhammad Rizki Fajri. "Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo." E-journal.

<sup>53</sup> Dyah Pravitasari. "Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam Di Indonesia." E-journal AN-NISBAH, Vol. 01, No. 02, April 2015.

benar dan adil. Seorang Akuntan ketika menyajikan laporan keuangan hendaknya disusun berdasarkan atas bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi (entitas) baik itu yang berbasis konvensional maupun syariah yang dijalankan oleh manajemen yang telah ditunjuk sebelumnya. Perbedaan penelitian ini adalah meneliti mengenai Kode etik mengenai akuntansi islam di indonesia sedangkan penelitian saya adalah menganalisis tentang kinerja keuangan yang di dalamnya membahas Belanja, pendapatan daerah, kinerja keuangan ditinjau dari perspektif islam dan juga instansi pemerintah yang diteliti berbeda. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai aspek islam dalam akuntansi sebagai bahan untuk penelitian.

### **C. Kerangka Konseptual**

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pengeluaran dalam bentuk belanja modal yang menjadi sorotan publik karena alokasi keuangan merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan ini untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan maupun sumber daya yang lainnya pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah berusaha melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran, tetapi fungsi dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah kurang didukung oleh kesiapan daerah dalam membiayai pembangunan.

Untuk itu pemerintah menindaklanjuti dengan undang-undang yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan kewenangan (desentralisasi fiskal). Hal ini menandakan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan yang jelas dan tegas sehingga sumber-sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan publik. Berikut disajikan kerangka berfikir pada penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam Perspektif Islam.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual  
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar  
dalam Perspektif Islam.

